

ABSTRAK

Tesis Ini Berjudul Analisis Yuridis Kewenangan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Undang-Undang Minerba terbaru membawa beberapa perubahan, hal yang sangat terlihat yaitu persegeran kewenangan kepada pemerintah daerah ke pusat (sentralisasi), hal tersebut bertentangan dengan Pasal 18 Ayat 2 UUD 1945. Dalam penelitian ini dirumuskan dua permasalahan, yaitu: (1). Bagaimana Kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Alam Pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara? (2). Bagaimana Analisis Yuridis Pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara?. Jenis penelitian yang digunakan penelitian hukum normative (*normatif law research*), menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), teknik pengumpulan data studi pustaka (*library research*) terhadap bahan hukum dan analisis data menggunakan tiga proses yaitu reduksi data, penyamaran dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini dapat disimpulkan: (1). Kewenangan pada Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 berbentuk sentralisasi dan bentuk legitimasi kewenangan delegasi yang memberikan dampak buruk bagi kesejahteraan negara, adanya delik pada Pasal 162 membungkam pembela lingkungan yang dalam hal ini masyarakat yang menolak aktivitas tambang hal demikianpun tak sejalan dengan prinsip umum *maqashid syariah* yang seharusnya menjaga harta dalam hal ini hasil bumi mineral dan batubara. (2) Analisis Yuridis Pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara bertentangan dengan Pasal 18 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 dan ketentuan Pasal 4 ayat 2 UU *a quo* telah merendahkan harga diri masyarakat dan pemerintah daerah akibat hilangnya ruang partisipasi untuk membangun wilayah secara mandiri sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Kata Kunci : Kewenangan, Pertambangan Minerba, Pemerintah Daerah

ABSTRACT

This thesis is entitled Juridical Analysis of the Authority of the Central Government and Regional Governments in Managing Mineral and Coal Mining According to Law Number 3 of 2020. The latest Minerba Law brings several changes, the most visible thing is the shift of authority from regional governments to the center (centralization) , this is contrary to Article 18 Paragraph 2 of the 1945 Constitution. In this research two problems were formulated, namely: (1). What is the authority for natural resource management in Law Number 3 of 2020 concerning Mineral and Coal Mining? (2). What is the Juridical Analysis of Law Number 3 of 2020 concerning Mineral and Coal Mining? The type of research used is normative legal research, using a statutory approach, library research data collection techniques on legal materials and data analysis using three processes, namely data reduction, masking and drawing conclusions. This research can be concluded: (1). The authority in Law Number 3 of 2020 is in the form of centralization and a form of legitimizing delegated authority which has a negative impact on the welfare of the state. The offense in Article 162 silences environmental defenders, in this case people who reject mining activities. This is also not in line with the general principles of maqashid sharia which should safeguard assets, in this case mineral and coal products. (2) Juridical Analysis of Law Number 3 of 2020 concerning Mineral and Coal Mining is contrary to Article 18 Paragraph 2 of the 1945 Constitution and the provisions of Article 4 paragraph 2 of the a quo Law has lowered the self-esteem of the community and regional government due to the loss of space for participation to develop the region independently in accordance with the provisions of Law Number 23 of 2014.

Keywords: Authority, Mineral and Coal Mining, Regional Government